

ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI SURAT KABAR HARIAN SUARA MERDEKA

Oleh : Yuliyanto Budi Setiawan
E-mail : youlee_wa2n@yahoo.co.id

Abstract:

Instead of giving empathy to the victims, newspapers tended to wrongly illustrate the violence as such that they were likely placing women in disgrace. The media described the women as the object of sexual fantasy, harassment, and violence. The problem was how the media presented the violence in their news. There seemed no empathy to the victims of violence against women. Such paradigm brought the victims into a symbolic violence. A critical discourse analysis was necessary to find out textual aspects, production, consumption, and socio-cultural contexts of gender-based violence news on a newspaper, like what this study had performed to Suara Merdeka daily. Using a qualitative descriptive technique with critical perspective, this study analyzed the qualitative data according to Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis. Having explored texts presented on the news on Suara Merdeka daily, the study found a gender bias. This study suggested that most journalists in Suara Merdeka hardly found opportunities to attend gender-related workshops, so that the news output they produced did not cover both side of story. Instead, the news presented were likely having a mindset that all the readers were males. Suara Merdeka had unfairly informed the news of the violence against women, placing them as the object who suffered by implicitly showing the superiority of men over them. Such mischief could have had been avoided had Suara Merdeka already performed in-depth training and knowledge improvement to the journalists in such that they became aware of women's position in the gender-based violence.

Keywords: *news, text, production, consumption, socio-cultural, gender.*

Pendahuluan

Berdasarkan Data Monitoring Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Jawa Tengah (Jateng) periode 2008-2009 (tercatat mulai Nopember 2008 sampai Oktober 2009), oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Legal Resources Center-Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dan juga oleh pemberitaan kasus serupa di lima media massa cetak harian (Suara Merdeka, Wawasan, Kompas, Jawa Pos-Radar Semarang, Solo Pos); ternyata telah terjadi kasus Perkosaan sebesar 210 kasus (jumlah kasus yang melapor ke LRC-KJHAM: 17, untuk jumlah informasi kasus tersebut dari media: 193), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 149 kasus (73:76), Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) sejumlah 101 kasus (6:95), Pelecehan Seksual tertulis 16 kasus (0:16), Eksploitasi Terhadap Prostitut Wanita (Pekerja Seks Komersial (PSK)) tercatat 71 kasus (0:71), Kekerasan Terhadap Buruh Migran Wanita (44 kasus (7:37)) dan kasus Trafficking (Perdagangan Wanita) terungkap sebesar 23 kasus (0:23) (Divisi Monitoring LRC-KJHAM, 2009: 1-27).

Data di atas juga ingin menekankan adanya fakta bahwa kasus kekerasan terhadap wanita kerap kali muncul setiap tahunnya, dalam kehidupan sosial budaya di lingkungan masyarakat. Salah satu datanya bisa kita ketahui dengan membaca berita-berita kekerasan tersebut yang termuat di enam surat kabar harian (Kompas, Suara Merdeka, Wawasan, Jawa Pos-Radar Semarang, Jawa Pos-Radar Kudus dan Solo Pos). Bahkan tindakan perkosaan ini bisa menjadi budaya, ketika fenomena ini kerap kali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya memperkosa merupakan serangkaian kepercayaan yang kompleks yang mendukung agresi seksual dan kekerasan pria terhadap wanita. Budaya ini melihat kekerasan sebagai sesuatu yang seksi dan seksualitas sebagai kekerasan. Dalam budaya perkosaan, wanita dijadikan objek pelecehan (Subono, 2000: 10).

Fenomena realita kekerasan (violence) ini sesungguhnya kontra produktif/bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila yaitu 'Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab', di mana deskripsi dari konsep sila tersebut lebih mengedepankan pada pengakuan publik untuk

memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; pengakuan atas persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan—bedakan agama, kepercayaan, jenis kelamin/gender, warna kulit, keturunan, suku dan kedudukan sosial; serta konsep sila ini menitikberatkan pada pengembangan sikap saling mencintai sesama manusia.

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan lemahnya perlindungan hukum bagi wanita korban di Indonesia, kemungkinan dikarenakan eksistensi dari adanya sistem budaya patriarkal di masyarakat, di mana sistem pranata sosial ini mendasarkan pada relasi yang timpang menurut kategori kuat-lemah, pihak yang kuat menguasai dan menindas pihak yang lemah ataupun sistem budaya sosial yang memarginalkan posisi wanita secara tetap di masyarakat, di mana seolah—olah melegitimasi berbagai macam ketidakadilan, perampasan dan penindasan yang dilakukan pelaku atas hak asasi wanita korban (Murniati, 2004: 227–229).

Selain itu, media massa juga mempunyai potensi sebagai pemicu munculnya bentuk-bentuk realitas ketimpangan hubungan sosial (social relationships (baca: kekerasan)) dalam kehidupan bermasyarakat. Sosok wanita oleh media massa, baik melalui iklan atau beritanya, selalu dideskripsikan secara negatif dan sangat tipikal yaitu tempatnya wanita ada di rumah, berperan tunggal sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh, tergantung pada pria, menjalani profesi secara terbatas, tidak mampu membuat keputusan penting, selalu melihat dirinya sendiri, sebagai objek seksual/symbol seks (sexploitation, pornographizing), objek peneguhan pola kerja patriarki, objek fetish, objek pelecehan dan kekerasan, selalu disalahkan (blaming the victim) dan bersikap pasif, serta sebagai alat pembujuk/negosiasi. Eksistensi wanita tidak terwakili pula secara proporsional di media massa, entah dalam industri media hiburan atau dalam industri media berita (Wolf dalam Sunarto, 2009: 4).

Melalui fungsi mediasinya, media sejatinya menunjukkan sesuatu pada khalayaknya bagaimana semua kekerasan tersebut diinformasikan dan dikonstruksi agar dipahami oleh publik secara lumrah sebagaimana adanya. Contohnya saja, pada liputan jurnalistik tentang kasus Eksploitasi

Terhadap Prostitut Wanita (Pekerja Seks Komersial). Selain mengetahui bagaimana proses terjadinya kekerasan, khalayak sepertinya digiring oleh media untuk ikut menyalahkan korban (blaming the victim), sebagaimana ditunjukkan oleh Data Monitoring LRC-KJHAM (2009: 17), yaitu sebagai berikut:

Pelaku mengaku membunuh korban/PSK yang berusia 30 tahun, dikarenakan korban tidak mampu melayani nafsu pelaku (19 tahun) sampai tuntas, padahal pelaku sudah menyerahkan uangnya sebesar 100 ribu. Korban melayani satu kali, lalu merasa tidak cukup, pelaku meminta lagi, namun korban menolak dan dibunuh pelaku dengan batu besar. Pelaku menghantamkan batu ke kepala korban sebanyak delapan kali, lalu pelaku meninggalkan korban begitu saja di tambak, karena ada orang yang datang. Pelaku kini ditahan di Polres Kendal (Surat Kabar Harian 'Suara Merdeka', 18 Agustus 2008).

Inilah realita pemberitaan media kita saat ini selama mengilustrasikan kasusnya para wanita korban kekerasan. Melalui studi Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis), peneliti ingin mengilustrasikan bagaimana teks pemberitaan kekerasan terhadap wanita (textual interrogation) dihadirkan seperti itu di Suara Merdeka? Bagaimana ketidakadilan dijalankan dan diproduksi oleh praktisi media melalui teks-teks beritanya? Lalu, bagaimana pertautan textual interrogation tersebut dengan konteks makro yang 'tersembunyi' di balik teks? Adapun tujuan dari penelitian ini, diantaranya: mendeskripsikan bagaimana konstruksi teks pemberitaan kekerasan terhadap wanita dihadirkan seperti itu di Surat Kabar Harian 'Suara Merdeka'; mengilustrasikan bagaimana ketidakadilan dijalankan dan diproduksi oleh praktisi media melalui teks-teks beritanya; serta mendeskripsikan pertautan antara hasil analisis teks tersebut dengan konteks makro yang 'tersembunyi' di balik teks.

Sementara itu, perspektif/paradigma yang digunakan untuk menjelaskan deskripsi pemberitaan kekerasan berbasis gender (kekerasan terhadap wanita) di Surat Kabar Harian 'Suara Merdeka' yaitu perspektif kritis (Genre of Critical Theory). Mengingat perspektif ini menaruh perhatian/menekankan pada conflict of interest yang menyebabkan ketidaksetaraan dan penindasan dalam masyarakat. Teori-teori kritik berupaya memahami kondisi sosial

yang tertindas (*marginalized groups*) dan bertindak (melakukan advokasi) mengatasi kekuatan-kekuatan yang menindas, dalam rangka mempromosikan emansipasi wanita dan partisipasi masyarakat secara lebih bebas (Foss dan Littlejohn, 2005: 46-47).

Teori pendukung lainnya yang dipakai peneliti dalam studi ini yaitu teori ideologi dari pemikiran Raymond William dan Louis Althusser. Sementara itu, ada wacana mengenai bagaimana suatu berita dimaknai? Makna itu diproduksi lewat proses yang aktif dan dinamis, baik dari sisi pembuat maupun khalayak pembaca. Pembaca dan teks berita secara bersama-sama mempunyai andil yang sama dalam memproduksi pemaknaan, dan hubungan tersebut menempatkan khalayak pembaca sebagai satu bagian dari hubungannya dengan sistem tata nilai yang lebih besar dimana dia hidup dalam masyarakat. Pada titik inilah ideologi bekerja (Fiske, 1990: 164).

Salah satu hal penting dalam teori ideologi Althusser adalah konsepnya mengenai subjek dan ideologi. Pada intinya, ideologi dalam pandangan Althusser selalu memerlukan subjek dan subjek memerlukan ideologi. Ideologi merupakan hasil rumusan dari individu-individu tertentu. Keberlakuannya menuntut tidak hanya kelompok yang bersangkutan. Akan tetapi, selain membutuhkan subjek, ideologi juga menciptakan subjek. Usaha inilah yang dinamakan interpelasi (Cahyadi dalam Tim Redaksi Driyarkara, 1993: 55-56). Sementara itu, media juga berisi tentang interpelasi, kita mengadopsi posisi sosial tertentu atau hubungan sosial tertentu di mana posisi seseorang ditentukan. Seperti yang dinyatakan oleh Tolson, teks/berita media selalu menyapa seseorang dan menempatkan seseorang ketika harus membaca atau melihat suatu berita (Tolson, 1996: 53). Kenapa dipersepsikan demikian? Karena berita media pada dasarnya bukan ditujukan untuk dirinya sendiri, pesan media pada dasarnya ditujukan untuk berkomunikasi dengan khalayak. Berita-berita kekerasan berbasis gender di Surat Kabar Harian 'Suara Merdeka', tidak hanya ditujukan kepada para pelaku dan korban kekerasan, namun berita ini juga ingin menyapa khalayak pembaca.

Teori Althusser tentang ideologi ini menekankan pada bagaimana kekuasaan kelompok yang dominan dalam mengontrol kelompok lain. Pertanyaannya, bagaimana

cara atau penyebaran ideologi ini dilakukan? Pada titik inilah, konsep hegemoni yang dipopulerkan oleh ahli filsafat politik terkemuka Italia, Antonio Gramsci, layak dikedepankan. Gramsci mengkonstruksi suatu teori yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi oleh kehadiran kelompok dominan berlangsung dalam suatu proses yang damai, tanpa tindakan kekerasan. Media massa dapat menjadi sarana di mana satu kelompok mengukuhkan posisinya dan merendahkan kelompok lainnya. Hal ini bukan berarti media merupakan perwujudan kekuatan jahat yang secara sengaja merendahkan masyarakat kelas bawah.

Proses bagaimana wacana mengenai gambaran masyarakat bawah bisa buruk di media, berlangsung dalam suatu proses yang kompleks. Proses marjinalisasi wacana itu berlangsung secara wajar (*common sense*), apa adanya dan dihayati bersama. *Common sense* ini berkaitan dengan kecenderungan untuk menempatkan unsur dramatisasi dalam pemberitaan. Hal ini mungkin berhubungan dengan kebiasaan wartawan yang lebih mengedepankan pada hal-hal apa saja yang menarik untuk diberitakan ke publik. Sementara itu, khalayak di sisi lain tidak merasa dibodohi atau dimanipulasi oleh media. Hegemoni bekerja melalui konsensus sosial dan budaya. Konsep hegemoni menolong kita untuk menjelaskan bagaimana proses ini berlangsung (Gramsci dalam Bell dan Garrett, 1998: 107-109). Teori hegemoni dari Antonio Gramsci tersebut dijadikan oleh peneliti sebagai teori utama dalam studi ini.

Sementara itu, dalam kerja jurnalistik, apa yang disebut sebagai nilai berita terkadang secara tidak sadar menggiring upaya untuk memarjinalkan kelompok bawah. Misalnya, adanya asumsi tentang wacana pemberitaan menyangkut kasus perkosaan, yakni korbannya dideskripsikan sebagai wanita pekerja malam, seorang janda cantik, peragawati; sebaliknya pelakunya digambarkan sebagai anak yang pendiam atau ayah yang baik bagi anak-anaknya. Kenapa bisa terjadi demikian? Seperti juga konsepsi/asumsi utama suatu berita 'anjing menggigit manusia bukan berita, manusia menggigit anjing baru berita', dalam berita perkosaan juga terjadi hal demikian 'orang memperkosa bukan berita, tapi nenek diperkosa baru menjadi berita'.

Artinya, ketika terjadi perkosaan

bukanlah berita, baru dianggap berita jika ada yang unik atau aneh dalam perkosaan tersebut. Contohnya, korbannya sekali lagi ternyata seorang peragawati, janda kembang, atau pelakunya seorang guru dan sebagainya. Tidaklah mengherankan apabila berita perkosaan adalah berita yang aneh dan unik, tentang bapak yang memperkosa anaknya, tentang pemuda alim yang tiba-tiba menjadi pemerkosa. Melalui ilustrasi semacam itu, secara implisit ditekankan bahwa perkosaan merupakan hal yang lumrah, yang biasa terjadi. Akibatnya lebih jauh, kasus perkosaan selalu menyudutkan posisi wanita, dikarenakan jelas sekali para pelaku perkosaan ini dideskripsikan sebagai orang yang baik, sementara korban perkosaannya yaitu wanita yang berperilaku dan berkepribadian buruk.

Metoda

Tipe penelitian yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif dengan perspektif kritis. Aspek yang esensial dalam pandangan kritis yaitu upaya pemahaman atas kondisi sosial yang tertindas (*under represented groups*) dan bertindak (*advokasi*) mengatasi kekuatan yang menindas, dalam rangka memperjuangkan emansipasi wanita dan partisipasi masyarakat secara luas (Foss dan Littlejohn, 2005: 46-47). Secara operasional, studi ini berusaha menggambarkan proses analisis wacana kritis mengenai teks/bahasa pemberitaan kasus kekerasan terhadap wanita (kekerasan berbasis gender) di Surat Kabar Harian 'Suara Merdeka'.

Subjek di studi ini adalah berita-berita kekerasan berbasis gender di surat kabar harian, redaktur pelaksana atau kepala desk atau jurnalis yang menulis topik tersebut, dan juga pembaca berita kekerasan ini. Untuk media yang dikaji, peneliti memilih Suara Merdeka. Penentuan media ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, fokus wilayah penelitiannya di Jateng, yang mana searah dengan *coverage area*-nya Surat Kabar 'Suara Merdeka'. Kedua, pemberitaan kekerasan terhadap wanita di surat kabar ini dijadikan pula sebagai salah satu referensi oleh Divisi Monitoring LRC-KJHAM, ketika menganalisa tingkat kekerasan tersebut di wilayah Jateng. Ketiga, berdasarkan data dari informan, jumlah redaksi maupun reporter prianya lebih banyak daripada jumlah redaksi/reporter wanita, sehingga proses produksi berita (termasuk produksi berita bertema

kekerasan berbasis gender) ditulis oleh jurnalis pria, akhirnya output beritanya menggunakan perspektif/selera pria. Untuk periodisasi penelitian ditentukan mulai Nopember 2008 sampai Desember 2009. Alasan penentuan periodisasi ini yaitu berita-berita kekerasannya relatif masih *up to date* (relatif baru terjadi) dan juga disesuaikan dengan periodisasi monitoring kasus yang dilakukan LSM LRC-KJHAM.

Teknik analisis data kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Critical Discourse Analysis* Norman Fairclough (*Analisis Texts, Discourse Practice dan Analisis Sociocultural Practice*) (Fairclough, 1995: 57-62 & 289-316). Fairclough menyatakan proses analisis *texts* ini sebagai *microlevel*, *discourse practice* sebagai *mesolevel* dan proses analisis *sociocultural practice* sebagai *macrolevel* (Fairclough dalam Krolokke dan Sorensen, 2006: 52-53). Fairclough memusatkan perhatian wacana pada bahasa. Fairclough membagi analisis wacananya dalam tiga dimensi, meliputi: *Analisis Texts* (menurut Fairclough, analisis *texts* ini disebut pula dengan '*linguistic analysis*'). Teks di sini dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik dan tata kalimat).

Ia juga memasukkan koherensi dan kohesivitas, bagaimana antarkata atau antarkalimat digabung sehingga membentuk pengertian/wacana. Semua elemen yang dianalisis tersebut dipakai untuk melihat tiga masalah berikut. Pertama, ideasional/representasi yang merujuk pada representasi tertentu yang ingin ditampilkan dalam teks, yang umumnya membawa muatan ideologis tertentu. Analisis ini pada dasarnya ingin melihat bagaimana sesuatu ditampilkan dalam teks/berita yang bisa mengandung seperangkat ideologis tertentu. Representasi ini menurut Fairclough ditelaah dalam tiga hal, yakni bagaimana seseorang, kelompok dan gagasan ditunjukkan dalam anak kalimat, dalam kombinasi anak kalimat serta dalam rangkaian antarkalimat.

Untuk representasi dalam anak kalimat, pemakai bahasa (jurnalis/reporter) sejatinya dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, pada tingkat pilihan kata/kosakata.

Kedua, pilihan yang didasarkan pada tingkat tata bahasa. Apakah peristiwa tertentu hendak ditampilkan sebagai sebuah tindakan, peristiwa, keadaan, atau hanya sebagai proses mental. Ciri

bentuk tindakan, anak kalimatnya berstruktur transitif (subjek+verb+objek). Untuk bentuk peristiwa, memiliki anak kalimat intransitif (subjek/objek+verb).

Untuk representasi dalam kombinasi anak kalimat, berarti koherensi antara anak kalimat ini mempunyai beberapa bentuk. Pertama, elaborasi, anak kalimat satu menjadi penjelas dari anak kalimat yang lain, dengan memakai kata sambung 'yang,' 'lalu' atau 'selanjutnya.' Kedua, perpanjangan, bisa memakai kata hubung 'dan.' Ketiga, mempertinggi, dengan kata hubung 'karena' atau 'diakibatkan.' Untuk representasi dalam rangkaian antarkalimat, maka dua/lebih kalimat disusun, di mana satu kalimat lebih menonjol dibandingkan dengan kalimat lainnya.

Selanjutnya, untuk aspek relasional tekstual, yaitu bagaimana pola hubungan antara wartawan dengan khalayak; antara partisipan publik (tokoh) dengan khalayak, dan antara wartawan dengan partisipan publik, ditampilkan dalam teks. Untuk aspek identitas tekstual ini berkaitan dengan bagaimana jurnalis mengidentifikasi dirinya dalam teks, sebagai bagian dari khalayak atau kelompok dominan atautkah menempatkan dirinya secara mandiri? Sementara itu, Discourse Practice merupakan dimensi yang berkaitan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Adanya wawancara mendalam dengan awak redaksi dan pembaca (informan) yang berkaitan dengan tema studi ini, dan atau mengamati news room. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informannya, tergantung sampai terjawabnya tujuan penelitian (Kanto dalam Bungin, 2003: 53).

Langkah terakhir, yakni Sociocultural Practice. Konteks sosial yang ada di luar media mempengaruhi bagaimana wacana muncul dalam media.

1. Level Situasional;

Teks berita dihasilkan dalam kondisi atau suasana yang khas, sehingga ada kemungkinan satu teks berbeda dengan teks lain untuk satu kasus.

2. Level Institusional;

Pengaruh institusi organisasi dalam produksi wacana, di antaranya: pengiklan, oplah/rating dan persaingan antarmedia.

3. Level Sosial;

Wacana yang muncul dalam media ditentukan pula oleh faktor perubahan masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk memahami konstruksi teks pemberitaan kekerasan berbasis gender, maka dilakukanlah analisis texts terhadap tujuh berita. Adapun tujuh berita itu, terdiri dari satu berita untuk kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), satu berita kasus pelecehan seksual, satu berita kasus perkosaan, satu berita kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), satu berita kasus eksploitasi terhadap prostitut wanita, satu berita kasus kekerasan terhadap buruh migran wanita dan juga satu berita kasus trafficking (perdagangan wanita). Penentuan berita-beritanya ini, didasarkan pada pertimbangan untuk mengetahui gambaran secara komprehensif tentang bagaimana konstruksi sosial yang terdapat di berita-berita kekerasan berbasis gender tersebut.

Untuk tujuh berita-berita kekerasan berbasis gender di Suara Merdeka yang menjadi salah satu subjek penelitian dalam studi ini, di antaranya berjudul: "Menuntut Nikah, Malah Dianiaya" (berita kasus KDP); "Foto Seronok Mirip Mahasiswi Beredar" (berita kasus pelecehan seksual); "Gadis Pabrik Dikerjai 11 Pemuda" (berita kasus perkosaan); "Suami Selingkuh, Aniaya Istri" (berita kasus KDRT); "Tak Mau Bayar, ABK Kapal Malah Hajar PSK" (berita kasus eksploitasi terhadap prostitut wanita); "Perjalanan Panjang Eks TKI yang Hilang (1), Lima Tahun Jadi Gelandangan, Hamil dan Kena Razia" (berita kasus kekerasan terhadap buruh migran wanita); dan "Kasus Trafficking di Sragen (2), Syaratnya Harus Cantik atau Bahenol" (berita kasus trafficking).

Secara tekstual, teks-teks berita tentang kasus kekerasan terhadap wanita di atas menunjukkan bias gender. Hal ini dapat terlihat dari pilihan-pilihan kata yang dipakai jurnalis, seperti: 'dipaksa', 'digilir', 'digarap', 'ikut nimbrung mengerjai korban', 'tergiur', 'mendapat jatah mengerjai korban', 'gadis berparas ayu', 'dihajar hingga babak belur', 'dipukuli menggunakan tangan kosong', 'tutur Tyas bertubuh bahenol ukuran bra 36 B', 'perempuan berparas manis tamatan SD', 'Gunawan merasa risih selalu diminta pacarnya segera menikahinya' dan 'seolah tidak percaya kalau harus mendekam di jeruji besi lantaran berurusan dengan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK)'. Kata-kata dalam news di atas terlihat dapat menarik perhatian khalayak, sebab mengikuti sudut pandang dan selera

pria. Berdasarkan pengakuan para informan, Suara Merdeka juga tidak fair, di satu sisi pemberitaan tentang korban kekerasan di-blow up dan direvictimisasi, sementara adanya fakta pelaku kekerasan yang berasal dari tokoh agama, terkesan ditutupi dan tidak diangkat oleh jajaran redaksi media.

Secara produksi teks bertema gender, lanjut para informan, jurnalis Suara Merdeka ternyata tidak sensitif gender dan tidak bisa menciptakan agenda setting, karena fokus strategi perusahaan Suara Merdeka ke orientasi pasar (market oriented). Berita harus dibuat sedemikian rupa sehingga dimungkinkan dapat menarik minat orang-orang untuk beriklan. Pihak pengiklan sendiri dapat menentukan kelangsungan hidup media. Oleh sebab itu, tegas Budi Santoso (pemilik media), produk jurnalistik dari institusi media ini disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan khalayaknya. Sementara itu, berita-berita yang sejatinya tidak sensitif gender ini tidak dipersepsikan aneh oleh khalayaknya. Mereka/informan menganggap sebagai suatu kewajaran/kelumrahan dan tidak perlu untuk dikritisi. Oleh karena itu, Suara Merdeka secara kuantitas jarang menerima kritikan/respon negatif dari pembacanya atas isi teks tersebut.

Secara konteks sociocultural, teks yang merendahkan atau memarjinalkan posisi wanita ini merepresentasikan ideologi patriarkal yang ada dalam masyarakat. Artinya, ideologi masyarakat yang patriarkal berperan dalam membentuk/menginternalisasi teks yang patriarkal pula. Ideologi patriarkal ini tersebar dan tertanam di tempat kerja jurnalis (divisi redaksional perusahaan media Suara Merdeka), di saat mereka/reporter mewawancarai narasumber dan ketika memproduksi teks berita serta di saat redaktur meng-edit teks berita tersebut. Apalagi jumlah jurnalis Suara Merdeka di dominasi oleh pria, yang mana dari total seratus tiga puluh reporter, hanya sembilan reporter berjenis kelamin wanita, dan mereka sedikit atau bahkan ada yang tidak pernah memperoleh workshop bertema gender, maka pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender perlu dipertanyakan, sehingga situasi selama proses produksi berita akan cenderung mengikuti standar/selera pria.

Dalam situasi yang seperti itu, maka perlu ada mekanisme internal perusahaan media menyangkut isu gender dan isu Hak Asasi Manusia (HAM), agar pemberitaan

jurnalis tidak dangkal. Untuk pelaksanaan mekanisme internal ini, bisa meliputi dua hal yakni: pertama, perlu adanya upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para jurnalis, bisa melalui workshop/pelatihan jurnalistik sadar gender. Lalu, kedua, perlu adanya pemberlakuan sanksi tegas terhadap jurnalis yang mendiskriminasi wanita korban kekerasan dalam teks-teks berita yang dibuatnya. Selain itu, pembaca harus menyikapi isi media secara kritis serta men-support fungsi dewan etik pers dalam mengontrol isi mass media yang di rasa bias gender.

Sementara itu, dalam lingkup akademis, bangunan teoritik yang dipakai untuk membahas studi analisis wacana kritis terhadap pemberitaan kekerasan terhadap wanita di Suara Merdeka ini, yakni critical theories, the Frankfurt School of Critical Theory, ideologi/ideological dan hegemoni. Namun, teori-teori di atas masih sebatas menginformasikan seperangkat gagasan konseptual tentang praktik media massa yang dijadikan sebagai sarana peneguhan kelompok dominan (praktisi/pemilik media/pria) yang sekaligus memarjinalkan kelompok minoritas (wanita korban kekerasan), di mana proses marjinalisasinya ini berlangsung secara wajar (common sense), apa adanya dan dihayati bersama. Selain itu juga, teori kritis tersebut hanya menawarkan tindakan (advokasi) untuk mengatasi kekuatan-kekuatan yang menindas, tetapi tidak disertai dengan pengetahuan tentang langkah-langkah advokasinya. Berlandaskan hasil studi yang telah dilakukan, maka cakupan teoritisnya (theoretical scope) perlu diperluas/perlu dimodifikasi dengan memasukkan faktor langkah-langkah tindakan nyata (misalnya: workshop rutin jurnalistik sensitif gender) yang ditujukan untuk para jurnalis (terutama jurnalis Suara Merdeka), agar mereka dapat memiliki dan meningkatkan konsep kesadaran gendernya selama menyusun teks berita.

Penutup

Konteks pemberitaan media massa di Suara Merdeka tentang kasus kekerasan terhadap wanita, kerap kali muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Angka kuantitas korbannya memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, keberadaan media massa ini sejatinya penting untuk proses pembelajaran dan pemenuhan informasi yang baik bagi masyarakat. Beberapa konsumen

media yang menjadi informan, menegaskan bahwa khalayak berhak memiliki informasi yang mencerahkan, bukan informasi-informasi yang bias gender (seperti kata: 'digilir', 'dikerjai') yang sejatinya tidak bermanfaat buat masyarakat, bahkan tergolong berita yang merugikan korban, sebab termasuk bentuk kekerasan simbolik terhadap diri korban. Teks-teks yang merendahkan atau memarjinalkan posisi wanita tersebut, merepresentasikan ideologi patriarkal yang ada dalam masyarakat. Artinya, ideologi masyarakat yang patriarkal berperan dalam membentuk/menginternalisasi teks yang patriarkal pula. Ideologi patriarkal ini tersebar dan tertanam di tempat kerja jurnalis (divisi redaksional perusahaan media Suara Merdeka), di saat mereka/reporter mewawancarai narasumber dan ketika memproduksi teks berita serta di saat redaktur meng-edit teks berita tersebut, sehingga output dari berita-berita kekerasan berbasis gender itu akan cenderung mengikuti standar dan selera pria.

Untuk konteks lainnya, hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan studi berikutnya melalui penggunaan kerangka berpikir atau perspektif yang berbeda. Studi analisis wacana kritis ini memakai genre of critical theory. Perspektif ini digunakan untuk menjelaskan deskripsi pemberitaan kekerasan berbasis gender (kekerasan terhadap wanita) di 'Suara Merdeka'. Mengingat perspektif tersebut menaruh perhatian pada conflict of interest yang menyebabkan ketidaksetaraan dan penindasan dalam masyarakat, khususnya masalah tentang praktik jurnalistik yang tidak sensitif gender. Kajian lebih lanjut, misalnya, dapat menggunakan paradigma/tradisi semiotika untuk penelitian tentang isi media massa. Bagi pemikir semiotik, isi/teks berita dianggap sebagai hal yang penting, sebagai hasil dari penggunaan tanda-tanda para praktisinya. Pandangan penelitian ini terfokus pada bagaimana cara produser (jurnalis) menciptakan tanda-tanda dalam setiap teks berita yang disusunnya dan bagaimana cara audiens/konsumen media memahami tanda-tanda tersebut (Baudrillard dalam Littlejohn dan Foss, 2008: 408-409). Ada beberapa kemungkinan pemaknaan dari tanda-tanda ini, apakah kerja jurnalis Suara Merdeka menciptakan tanda yang sensitif gender atau tidak. Melalui studi semiotika, teks media terkesan memberikan jarak antara simbol

dengan pengalaman dunia nyata.

Pada tataran metodologis, studi ini menerapkan analisis wacana kritis dari pemikiran Norman Fairclough. Fairclough menggunakan wacana menunjuk pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial, lebih daripada aktivitas individu. Selain itu, Fairclough juga membangun suatu model yang mengintegrasikan secara bersama analisis wacana yang didasarkan pada linguistik serta pada pemikiran sosial-politik, atau secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Oleh karena itu, metode ini kerap kali disebut sebagai model perubahan sosial (social change). Dalam penelitian yang akan dilakukan berikutnya, metoda lain bisa digunakan, misalnya dengan menerapkan metoda fenomenologi yang berupaya mengkaji lebih dalam tentang pengalaman dan persepsi dari setiap individu/informan mengenai berita-berita bertema kekerasan berbasis gender di Suara Merdeka. Gagasan teoritis ini menjadikan pengalaman hidup para informan yang sesungguhnya di tengah-tengah dominasi budaya patriarki, sebagai dasar dari suatu realita. Melalui metoda ini, peneliti akan memahami tanda-tanda khas (typification) dari sistem budaya patriarkal yang telah tertanam pada benak para jurnalis dan konsumen, sehingga mempengaruhi cara pandang mereka yang lebih fokus pada selera pria, ketika mereka memproduksi maupun ketika mengkonsumsi teks berita bertema gender.

Daftar Pustaka

Buku :

- Bell, Allan and Peter Garrett. (1998). *Approaches to Media Discourse (First Published)*. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd.
- Bungin, Burhan (Eds.). (2003). *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemaknaan Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Fairclough, Norman. (1995). *Media Discourse (First Published)*. New York: Edward Arnold (A member of the Hodder Headline Group).
- Fiske, John. (1990). *Introduction to Communication Studies (Second Edition)*. London and New York: Routledge.
- Foss, Karen A., and Stephen W. Littlejohn.

- (2005). *Theories of Human Communication (Eighth Edition)*. Albuquerque, New Mexico: Wadsworth, A Division of Thomson Learning, Inc.
- Murniati, A. Nunuk P. (2004). *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM) (Cetakan Pertama)*. Magelang: Yayasan IndonesiaTera (Anggota IKAPI) bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
- Sorensen, Anne Scott and Charlotte Krolokke. (2006). *Gender Communication Theories and Analyses*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
- Subono, Nur Iman. (2000). *Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) bekerjasama dengan The Asia Foundation Indonesia.
- Sunarto. (2009). *Televisi, Kekerasan & Perempuan (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tolson, Andrew. (1996). *Mediations: Text and Discourse in Media Studies*. New York: Arnold.
- Jurnal/Laporan/Makalah
:
Divisi Monitoring LRC-KJHAM. (2009). *Laporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Jawa Tengah Tahun 2008-2009*. LSM LRC-KJHAM: 1-27.
- Tim Redaksi Driyarkara (Eds.). (1993). *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Gramedia Pustaka Utama: 55-56.